

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Toleransi

2.1.1 Definisi Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata "Tolerare" yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Ihsan, 2009:24-25). di Indonesia, dasar dari toleransi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Hayun (2016, hlm. 405) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa toleransi itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Bila di kaitkan dalam kehidupan di masyarakat, toleransi berarti menghargai sikap orang lain, membiarkan, membolehkan kepercayaan atau agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Tanpa adanya sikap toleran, keberagaman itu akan memunculkan konflik, permasalahan dan pertentangan yang sangat merugikan.

Sedangkan Rusydiyah (2015, hlm. 291) menjelaskan bahwa toleransi merupakan sebuah sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda. Toleransi adalah sesuatu yang membuat dunia setara dari berbagai bentuk perbedaan. Jadi toleransi disini berarti adanya sebuah sikap yang menunjukkan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungan sekitar. Toleransi biasa ditunjukkan dengan pola kehidupan yang rukun dan tenang ditengah sebuah perbedaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman (2013, hlm. 82):

“Tolerance is not only the recognition and respect towards beliefs, but also demands respect for the individuals who belong in the society. In contrary, tolerance as planned by the West is tolerance without borders that gives absolute freedom to human rights. For instance, an individual who wants to practice free sex, then his wish should be given based on tolerance.”

Intinya, toleransi tidak hanya pengenalan dan hormat ke arah kepercayaan, tapi menghormati perorangan yang pantas pada masyarakat. Berbeda dengan toleransi di Barat dimana toleransi adalah tanpa perbatasan yang memberi kebebasan absolut ke hak azasi. Sebagai contoh, seseorang yang mau mempraktekkan jenis kelamin gratis, kemudian keinginannya harus diberikan berlandaskan toleransi.

Hasyim (1978, hlm. 22) mengartikan toleransi sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan nasibnya masing-masing. Dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah, kepercayaan agama, mengemukakan pendapat dan menerima perbedaan yang ada.

Kata toleransi pula diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki, meskipun ia mungkin tidak menyetujui atau mengizinkannya. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama lainnya.

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama

(penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001:13)

Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu:

- a) Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metode nya.
- b) Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
- c) Toleransi menghargai individu dan perbedaanya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidak pedulian.
- d) Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan.
- e) Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.
- f) Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit.

Dengan toleransi ini maka hidup bermasyarakat akan lebih tentram, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pembangunan negara akan lebih mudah. Berikut keuntungan yang diperoleh dari sikap toleransi menurut Aly Nashir, (2013, hlm. 94) sebagai berikut:

- 1) Membuat orang terbuka untuk mengenal orang lain
- 2) Mengembangkan kemampuan untuk menerima kehadiran orang lain yang berbeda-beda dengan tujuan dapat hidup secara damai
- 3) Mengakui individualitas keberagaman
- 4) Mudah menghilangkan topeng-topeng kepalsuan yang memecah belah dan mengatasi ketegangan akibat kemasabodohan
- 5) Memberikan kesempatan untuk menemukan dan mengenyahkan prasangka negatif dan stigma mengenai orang- orang yang berbeda bangsa, agama, budaya maupun warisan etniknya.

Berdasarkan konsep-konsep mengenai toleransi yang telah dipaparkan di atas, maka toleransi dapat mencakup dua kategori yaitu toleransi pasif dan toleransi aktif. Apriliani (2016, hlm. 6) menjelaskan kategori toleransi sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Kategori Toleransi*

No	Toleransi aktif	Toleransi pasif
1	Menerima dan menghormati perbedaan	Menerima dan menghormati Perbedaan
2	Berdasarkan kesadaran sendiri.	Berdasarkan kesadaran Sendiri
3	Memberikan dukungan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah dengan suatu tindakan nyata.	Memberikan kesempatan pemeluk agama lain untuk beribadah namun tidak melakukan suatu tindakan Nyata

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa toleransi pasif merupakan kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan pendapat,

pandangan, perilaku, dan kebiasaan serta memberikan kesempatan tanpa melakukan suatu tindakan nyata yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan praktik peribadatan agama lain, namun tetap berusaha untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dan hidup bersama dengan damai dengan kesadaran pribadi. Sedangkan toleransi aktif adalah kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan pendapat, pandangan, perilaku, kebiasaan dan memberikan kesempatan serta mendukung kelompok agama yang berbeda untuk menjalani praktik keagamaan dengan suatu tindakan nyata yang berbeda yang bertujuan menciptakan hubungan sosial yang baik dan hidup bersama dengan damai dengan kesadaran sendiri.

2.1.2 Unsur – unsur Toleransi

Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain (Walters, 2017). unsur-unsur tersebut adalah:

1. Memberikan Kebebasan Dan Kemerdekaan, Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri sendiri dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun, karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap Negara melindungi kebebasan – kebebasan setiap manusia baik dalam Undang – Undang maupun dalam peraturan yang ada Abdullah (2001:202).
2. Mengakui Hak Setiap Orang, Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing- masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang di jalankan itu tidak melanggar hak oranglain karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.
3. Menghormati Keyakinan Orang Lain, Dalam konteks ini, di berlakukan bagi toleransi antar agama. Namun apabila di kaitkan d alam toleransi sosial. Maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok.

Contohnya dalam pengambilan keputusan seseorang untuk memilih organisasi pencak silat. Sebagai individu yang toleran seseorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan kelompok organisasi pencak silat kita

4. Saling Mengerti, Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai Antara satu dengan yang lain (Hasyim, 1979:23).

2.2 Struktur Masyarakat Indonesia

Dilihat dari faktor-faktor pembentuknya, masyarakat Indonesia memiliki struktur yang bercorak majemuk. Kusumohamidjojo (2000: 45) melihat masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan masing-masing bersifat plural (jamak) sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas menunjukkan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai sub-kelompok masyarakat yang tidak bisa disatu kelompokkan dengan lainnya. Tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula dengan kebudayaan mereka. Heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsururnya. Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya benar-benar berbeda satu dari yang lainnya.

Menurut Nasikun (1993: 28), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu: (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan kedaerahan, (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan secara horizontal dimaknai sebagai perbedaan yang tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut (Awan Mutakin, dkk. 2004: 246–247). Sebagai contoh, perbedaan bahasa daerah tidak diartikan, bahwa bahasa daerah (suku bangsa) tertentu lebih baik daripada bahasa daerah (suku bangsa) lainnya.

Suatu masyarakat dikatakan bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat diverse atau berbeda. Masyarakat demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan sering timbul konflik-konflik sosial atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan. di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Dengan meminjam konsep Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial (Nasikun, 1993: 33).

MB. Smith (dalam Garna, 1996: 165) menganalisis bahwa masyarakat majemuk juga memiliki berbagai kelompok yang kebudayaannya berbagai ragam, sering berlangsung perpecahan dan pertentangan. Dari sisi politik, masyarakat majemuk dikuasai oleh satu kelompok minoritas yang juga memiliki kebudayaan sendiri. Masyarakat majemuk ini berwujud bukan atas dasar sistem nilai yang sama, tetapi oleh adanya konflik dan paksaan.

Berghe (dalam Garna 1996: 165) membedakan kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial berwujud juga masyarakat dipecahkan dalam kelompok kerja sama atas dasar lainnya, bukan atas dasar kebudayaan. Kemajemukan budaya adalah masyarakat majemuk yang timbul atas berwujudnya beberapa kelompok etnik. Selanjutnya, Berghe (dalam Garna 1996: 166) mengemukakan ciri-ciri masyarakat majemuk sebagai berikut:

1. ketiadaan konsensus nilai-nilai
2. beranekaragam kebudayaan
3. terjadi konflik di antara kelompok yang berlainan
4. otonomi atau kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial
5. diperlukan paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi sebagai dasar integrasi sosial.
6. terjadi dominasi politik oleh golongan-golongan tertentu
7. relasi antarkelompok lebih merupakan secondary segmental dan utilitarian, sedangkan relasi dalam kelompoknya lebih merupakan primary.

Mutakin, dkk. (2004: 250) berpendapat bahwa masyarakat majemuk dalam proses interaksi sosial mirip dengan diferensiasi sosial. Dengan mengutip pandangan Kaare Svalastoga, Mutakin, dkk. (2004: 250) mengartikan diferensiasi

sosial sebagai perbedaan tingkatan yang merupakan salah satu ciri yang sangat universal dari organisasi sosial. Dalam diferensiasi sosial, ada kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan seperti perbedaan menurut ciri-ciri biologis antara manusia. Perkembangan sosial yang berlawanan ini cenderung memudahkan munculnya konflik dan konflik sebagai dampak ikutan dari diferensiasi sosial merupakan salah satu karakter dari masyarakat majemuk.

2.3 Multikulturalisme

Secara etimologis istilah multikulturalisme (*multiculturalism*) berasal dari kata multi (banyak)- Kultur (budaya)-isme (pandangan-faham) atau faham budaya plural dan sebagai awannya adalah monokulturalisme atau faham budaya tunggal. Secara hakiki dari istilah tersebut mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing. Setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup Bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Multikulturalisme menurut Azra (2006, hlm. 8) mengatakan bahwa pada dasarnya adalah:

Multikulturalisme dunia yang kemudian dapat diterjemahkan kedalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan realitas pluralitas agama dan multicultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Multikulturalis sering digandengkan dengan hubungan antar etnik, idealnya merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnis minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Sedangkan menurut Stavenhagen dalam Supardan, (2008, hlm. 19), konsep multikulturalisme pertama, merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen. Kedua, multikulturalisme telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideology, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik

dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan.

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan penilaian terhadap kebudayaan kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri seperti Blum (2001, hlm.20). kata kunci dari pengetahuan tersebut adalah perbedaan dan penghargaan. Pendekatan multikulturalisme tidak sesungguhnya berlandaskan pada pemilihan yang mengisyaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu, tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan realitas yang ada.

Piera L. van Bergehe menunjukkan bahwa masyarakat majemuk memiliki sifat dasar sebagai berikut McClain (2001, hlm. 1625):

1. Terjadi segmentasi kedalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain;
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non-nonkomplementer;
3. Diantara anggota masyarakat kurang mengembangkan consensus atas nilai-nilai sosial dasar;
4. Secara reaktif seringkali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5. Secara relative seringkali terjadi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan didalam bidang ekonomi; dan
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas pada kelompok lain.

Secara antropologis, dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multicultural dengan etnis, budaya, agama, Bahasa, dan adat istiadat yang beragam. Dilihat dari realitas kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, agama, Bahasa, dan budaya tersebut, semuanya tergantung pada lokasi genius yang bersifat primordial Sumardjo menjelaskan (2002, hlm. 23), jumlah penduduk hampir mencapai 220jt jiwa, dengan kandungan budaya diantaranya 13.000 pulau besar dan kecil, 300suku yang menggunakan Bahasa hampir 210 jenis Bahasa dengan beberapa agama yang berbeda. Dengan

realitas kemajemukan bangsa tersebut, sangat memungkinkan terjadinya konflik. Keberagaman atau kemajemukan bangsa ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman disintegritas bangsa.

Keragaman etnik/budaya itu dalam kenyataannya tidak selalu diterima oleh kelompok mayoritas atau pemerintah yang berkuasa sebagai realitas sosial yang perlu dipelihara. Hal inilah yang perlu diluruskan bahwa multikulturalisme berarti keyakinan atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya begitulah yang dikemukakan oleh Suparlan (2003, hlm. 31). Jadi kata kunci dalam multikulturalisme adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan menurut Supardan (2004, hlm. 7). Dengan adanya pengetahuan, pemahaman, sampai pada kompromi sosial dan budaya dari setiap anggota masyarakat yang berbeda, diharapkan mampu menciptakan budaya public yang lebih politis, penerimaan, dan pengurangan peluang konflik antar Etnis. Artinya dengan memperlakukan semua budaya etnik yang ada secara adil dan setara, maka jauh kemungkinan adanya dominasi budaya tertentu yang dapat menghambat pengembangan budaya minoritas sekalipun. Blum (2001, hlm. 15).

2.3.1 Masyarakat Multikultural

Masyarakat Multikultural merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan ciri khas kebudayaan tersendiri namun membentuk satu kesatuan. Masyarakat multikultur diwarnai dengan kelompok kebudayaan yang sangat beragam jenis dan jumlahnya. Konsep kebudayaan bukan hanya merujuk pada suku bangsa dan adat istiadat, namun juga mencakup nilai, kebiasaan, pengetahuan, keyakinan, hukum dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana individu dan kelompok dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat membentuk satu kesatuan? Pertanyaan tersebut membawa kita pada konsep negara bangsa (nation state). Negara bangsa merupakan suatu kondisi dimana terdapat sekelompok individu yang bersatu diatas landasan persamaan latar belakang sejarah, persamaan nasib dan penderitaan masa lalu dan cita-cita masa depan.

Wilayah Indonesia yang dihuni oleh sebanyak 267.000.000 penduduk dari 1.340 suku bangsa mencirikan bentuk masyarakat multikultural. Meskipun masing-masing individu yang menempati wilayah Indonesia memiliki latar belakang budaya, adat istiadat serta bahasa yang berbeda namun individu-individu tersebut tetaplah diidentifikasi sebagai satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Hal tersebut mengingatkan kita kepada semboyan bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua.

2.3.2 Ciri dan Karakteristik Masyarakat Multikultural

Memiliki kebudayaan Majemuk Seperti yang dijelaskan sebelumnya, faktor letak dan kondisi geografis, kondisi iklim serta struktur tanah mendorong terbentuknya keragaman kebudayaan. Dalam hal ini, tiap-tiap kelompok masyarakat yang menempati wilayah geografis yang berbeda akan menciptakan sistem kebudayaan yang berbeda pula.

Memiliki nilai dan norma yang disepakati Bersama Adanya nilai dan norma yang disepakati bersama merupakan dua hal yang mendasari terbentuknya masyarakat multikultural dalam lingkup negara bangsa. Nilai dan norma dimaksud umumnya bersifat mendasar. Pada konteks Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan contoh dari nilai dan norma yang menjadi kesepakatan bersama warga negara Indonesia.

Bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. Perbedaan adat istiadat, ras, agama, pengetahuan hingga kebiasaan membuat proses integrasi pada masyarakat majemuk berjalan lambat. Ketergantungan antar kelompok masyarakat, perasaan senasib dan cita-cita masa depan mampu mendorong terciptanya integrasi pada masyarakat multicultural

Perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial Pada masyarakat multikultural, isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) berpotensi dijadikan alat untuk memecah belah persatuan bangsa oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Selain itu, ikatan primordial yang kuat pada kelompok suku tertentu juga dapat menjadi pemicu konflik horizontal pada masyarakat multikultural. Pada dasarnya konflik dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihilangkan namun selalu dapat dikelola agar menjadi konflik yang sifatnya terbuka

Terjadi dominasi kelompok dominan pada sektor ekonomi, politik dan sosial budaya. Pada masyarakat multikultural yang beragam, jumlah menjadi hal yang penting sehingga dikenal istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas memiliki kecenderungan mendominasi sumber-sumber ekonomi, sistem politik dan budaya. Apabila dominasi tersebut tidak dikelola dengan baik maka ada kecenderungan akan terjadi konflik sosial dalam masyarakat.

2.4 Sistem Budaya Indonesia

Budaya Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menjalin dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Untuk memahami sistem budaya Indonesia diperlukan konsep dasar kebudayaan dari para ahli antropologi di antaranya dari Koentjaraningrat, Goodenough, dan Keesing. Selain itu, dibahas tentang kebudayaan sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam kaitan ini kebudayaan dilihat sebagai nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia dan menjadi ukuran bersama dalam saling memahami perilaku dalam hidup bermasyarakat. Bertolak dari konsep kebudayaan dan fungsinya sebagai pedoman hidup, selanjutnya dibahas gambaran tentang pola hidup masyarakat Indonesia, keragaman kebudayaan Indonesia, beserta orientasi nilai budaya masyarakat Indonesia.

2.4.1 Kebudayaan Sebagai Pedoman Hidup

Kebudayaan mengandung nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan sumber aturan dan merupakan pedoman hidup bagi suatu masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dalam suatu kebudayaan yang sama terdapat banyak pemikiran, sikap, dan tindakan yang sama diperlihatkan oleh warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Sebagai contoh apa yang sering kita lakukan ternyata juga sering dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Jika kita bertamu ke rumah seseorang, kita akan mengetuk pintu atau membunyikan bel rumah. Hal itu juga sering dilakukan oleh orang lain ketika mereka bertamu. Ketika ada seorang Jawa bertemu dengan orang yang lebih tua, ia menunjukkan sikap hormat dengan

menggunakan bahasa kromo inggil (bahasa Jawa halus), hal itu juga dilakukan oleh orang Jawa lainnya. Harsya Bachtar (1979: 67–68) mengatakan bahwa pemikiran yang kita wujudkan kebanyakan bukan merupakan pemikiran khusus kita sendiri. Kebanyakan pemikiran kita terdiri atas unsur-unsur budaya yang kita peroleh dari pengalaman hidup kita di tengah masyarakat dan melalui pendidikan. Banyak unsur-unsur kebudayaan telah menjadi pengatur pemikiran kita, sikap kita, dan tindakan-tindakan kita.

2.4.2 Kebudayaan dan Kepribadian Masyarakat

Kebudayaan merupakan pedoman hidup masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan pola-pola hidup masyarakat. Dalam waktu yang lama, kebudayaan memberikan arah dan dinamika kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memiliki berbagai pola hidup (Anas, 2002: 3–7). Di Indonesia secara garis besar terdapat empat pola hidup masyarakat masa lalu yang memiliki arti penting dilihat dari peranannya dalam pembentukan kepribadian bangsa. Keempat pola hidup tersebut adalah pola hidup peramu, pola hidup petani ladang, pola hidup petani sawah, dan pola hidup masyarakat pesisir.

1. Pola Masyarakat Petani Ladang

Masyarakat petani ladang berbeda dengan peramu karena mereka telah hidup menetap. Mereka bermukim secara berkelompok dan membentuk tempat tinggal yang berdekatan dengan ladang mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memproduksi sendiri melalui cara berladang. Oleh karena itu, petani ladang merupakan masyarakat yang bersifat produktif. Mereka mendirikan desa-desa di pinggir hutan atau dekat dengan rawa-rawa. Mereka menyukai hidup bermukim secara tetap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenteram.

Dalam mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan bersama mereka telah mengembangkan suatu cara hidup yang di dasarkan atas prinsip-prinsip berikut.

- a. Pengutamaan kepentingan kehidupan bersama/umum.
- b. Pengakuan hak-hak asasi, seperti hak hidup, hak milik, hak perkawinan, hak atas kebenaran, dan hak atas nama baik.
- c. Pengakuan hak milik bersama (teritorial).
- d. Ada hierarki dalam kehidupan, yaitu kelas bangsawan dan rakyat biasa.

Prinsip-prinsip tersebut memengaruhi hak dan kewajiban serta tata krama (norma-norma) yang berlaku dalam masyarakat baik dalam mempertahankan hidup (mencari nafkah) maupun menjaga kelangsungan hidup (perkawinan). Dari segi kepercayaan masyarakat petani ladang relatif sama dengan kepercayaan pada masyarakat peramu. Mereka mempercayai bahwa benda-benda yang ada di alam semesta ini memiliki jiwa atau roh. Mereka meyakini hukum alam itu mutlak dan mereka menghargainya.

2. Pola Hidup Masyarakat Petani Sawah

Pola hidup petani sawah banyak yang sama dengan pola hidup petani ladang, terutama cara hidup berkelompok dan menetap. Masyarakat petani sawah selalu berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan keluarga dengan kebutuhan relasinya di luar keluarga. Mereka memandang keseimbangan tersebut sebagai keseimbangan kosmis untuk dapat menyelamatkan hidup mereka. Dalam hal keharmonisan masyarakat petani sawah berbeda dari petani ladang. Masyarakat petani ladang mengutamakan keharmonisan dalam arti luas, masyarakat petani sawah sebaliknya mengutamakan Studi Masyarakat Indonesia 65 keharmonisan dalam arti jiwa (kehidupan rohani). Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bali yang sangat mengutamakan ketenteraman batin dan melebihi pengutamaan kebutuhan hidup duniawi.

3. Pola Hidup Masyarakat Pesisir

Ciri kehidupan masyarakat pesisir yang menonjol adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Mereka sangat mobil dan tidak terikat pada satu jenis mata pencaharian saja. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bugis, Makassar, dan Melayu. Di antara mereka ada yang menjadi nelayan, petani ladang, petani sawah, pedagang, dan lain-lain. Mereka mau mencari sumber-sumber kehidupan di berbagai tempat dan memanfaatkan semua fasilitas hidup yang dimiliki. Dalam mencari penghidupan mereka tidak hanya memproduksi untuk diri sendiri, tetapi juga untuk perdagangan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Bugis sudah lama dikenal sebagai produsen beras tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri, tetapi kebutuhan ekspor. Dalam menaati peraturan, masyarakat pesisir yang berjiwa

dagang sangat memperhatikan segi untung dan rugi. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang menjaga gengsi (harga diri) pribadi maupun kelompok.

2.4.3 Kajian tentang Nilai Kearifan Lokal

Kearifan local atau “*local genius*” merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wlaes dalam Ayatrohaedi (1986, hlm. 30) yaitu “*the sum of the culture characteristics which the vast majority of a people have common as result of their experiences in early life*”. Maksud dari pernyataan tersebut, kearifan local merupakan sekumpulan karakteristik budaya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kearifan local merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan menjadi identitas masyarakat tertentu. Di Indonesia, kearifan local itu tidak hanya berlaku secara local saja pada budaya etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik, sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir disetiap budaya local Nusantara dikenal kearifan local yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan seterusnya. Suyanto dalam Susanto (2015, hlm. 346) menyebutkan bahwa pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan local diajarkan Turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi baik melalui sastra lisan (dalam bentuk pepatah, pribahasa) dan manuskrip.

Dalam Masyarakat tradisional khususnya kepulauan yang menjadi basis bagi berkembangnya kearifan local dapat ditemukan dalam berbagai bentuk budaya seperti nyanyian, pepatah, petuah, semboyan, serta kitab-kitab kuno seperti primbon atau catatan yang dijadikan acuan hukum adat atau pedoman oleh masyarakat tradisional. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat 1978 dalam Budimansyah & Suryadi (2008, hlm. 69) pada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat yang melukiskan penghayatan tentang nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat masing-masing zamannya.

Konsep kearifan local (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tentram dan diikuti oleh anggota masyarakatnya Sartini (2004, hlm. 119) menyebutkan kearifan loka sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*) kearifan local adalah fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat tentang dunia sekitar, menyelesaikan masalah dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan local adalah bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. Pengertian kearifan local menurut Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi (1986, hlm. 18-19), merupakan sebuah identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/ bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan loka sifatnya menyatu dengan karakter masyarakat, karena keberadaannya selalu dilaksanakan dan dilestarikan, dalam kondisi tertentu malah sangat dihormati.

Rahyono (2009, hlm. 7) mendefinisikan kearifan local sebagai sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu, yang diperoleh melalui pengalamannya etnis tersebut bergulat dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan definisi Rahyono dapat kita ketahui bahwa kearifan loka merupakan buah atau hasil dari masyarakat/etnis tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain, kearifan local ini teruji dan melalui proses Panjang, bahkan usianya hampir menyamai keberadaan sebuah masyarakat atau etnis tertentu. Suhatini (2009, hlm. 1), juga menambahkan bahwa definisi kearifan local sebagai sebuah warisan nenek moyang yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan, Tata nilai kehidupan ini menyatu tidak hanya dalam bentuk religi, tetapi juga dalam budaya dan adat istiadat. Ketika sebuah masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, mereka mengembangkan suku kearifan baik yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Senada dengan Suhatini, Putu Oka dalam Wiboyo & Gunawan (2015, hlm. 18), menyebut kearifan local sebagai bentuk kearifan, juga cara sikap terhadap lingkungan yang

ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat atau daerah. Dengan demikian kearifan local itu merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu.

Sementara Keraf dalam Wibowo & Gunawan (2015, hlm. 18) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntin perilaku manusia dalam kehidupan berkomunitas ekologis. Semua bentuk kearifan local ini di hayati, dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari generasi kegenerasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia dan alam. Selanjutnya Francis Wahono dalam Wibowo & Gunawan (2015, hlm. 18) memberikan definisi mengenai kearifan local, merupakan kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika tetapi sampai pada norma, Tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang mendomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun mentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

2.5 Komunitarianisme

Filsafat Komunitarianisme berasal dari dasar kata komunitarian, istilah tersebut di ciptakan oleh Goodwyn Barmby pada abad ke 20 tepatnya tahun 1840-an. Gagasan-gagasan mereka pada dasarnya bertolak belakang dengan paham liberalisme, kapitalisme dan sosialisme. ada tiga konsep dasar dari perkembangan pemikirannya antara lain. Pertama Komunitarianisme filosofis pemahaman mereka lebih mengedepankan peranan komunitas ketimbang individu yang membentuk komunitas tersebut. menurut Budiman Sudjatmiko (2007), orientasi mereka pada upaya memuaskan kebutuhan seluruh komunitas (terlepas punya daya beli atau tidak), peran aktif negara, serta bersifat holistik atau saling tergantung antarmanusia, dan manusia dengan alam.

Stereotif mereka melihat individu memiliki ketergantungan satu-sama lainnya dalam satu kesatuan dalam komunitas. menurut mereka, hubungan indifidu terhadap komunitas bersifat deduktif, karena mereka menganggap individu

memiliki kebebasan. individu memiliki hak untuk berbeda pendapat atau menolak pendapat mayoritas komunitas. menurut penulis, pandangan yang lebih menekankan akan peranan komunitas dari pada individu dalam komunitas itulah yang bertolak belakang dengan gagasan-gagasan dari teori-teori liberalism terutama bila mana di kaitkan dengan nilai keadilan.

Kedua, Komunitarianisme ideologis pemikirannya banyak di pengaruhi oleh Amitai Etzioniseorang sosiolog Israel–Amerika berkelahiran Jerman pada awal tahun 1990-an. dalam frase ini, pemikiran mereka lebih menekankan pada modal social, menurut mereka modal social sebuah komponen penting dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi. maksudnya, pemerintah memiliki peran penting sebagai agen pelayan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang kompleks itu, pemerintah (public) di perbolehkan bekerja sama perusahaan-perusahaan swasta (privat) selama tidak merugikan masyarakat. biasanya bentuk dari kerjasama antara pemerintah dan swasta di bidang pelayanan-pelayanan social seperti pendidikan dan Kesehatan.

Karena kurangnya literature penulis mengenai gagasan pemikiran komunitarian tentang “modal social” maka penulis mengajukan dua pertanyaan dasar sehingga pada nantinya pertanyaan ini dapat menjawab perdebatan-perdebatan mengenai filsafat komunitarian. pertanyaan pertama, sampai dimana tingkat intervensi pemerintah sebagai agen pelayan masyarakat? dan kedua, apakah pihak swasta di berikan kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber yang menjadi kebutuhan dasar manusia (public good) seperti air, listrik, minyak bumi, dll. bilamana pertanyaan penulis di benarkan maka sampai di mana pemberian untuk memprivatisasi barang public di berikan? apakah pemerintah juga di libatkan?

Kedua pandangan mereka tentang “hak-hak positif maksudnya pelimpahan hak individu (hak negative) untuk kepentingan bersama. mereka beranggapan kepentingan bersama merupakan kepentingan dari pada individu itu sendiri[5]. sebagai gambaran pemerintah berhak memberlakukan pajak pada setiap warga negaranya (mengambil hak individu/hak negatif), kemudian sebagai timbal baliknya, pemerintah akan mengupayakan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat seperti pendidikan gratis, pemeliharaan kesehatan yang terjangkau, mensubsidi BBM atau pengalihan bantuan kepada masyarakat yang memiliki

tingkat kesejahteraan rendah. tentunya gambaran diatas bertolak belakang dengan filsafat individual (liberalism) dalam system yang demokratis. komunitarian berpandangan individualis akan menghancurkan hubungan kebersamaan yang ada sebelumnya dalam pemerintahan demokrasi. prinsip dari pemikiran mereka adalah individu memiliki hak bilamana di sertai dengan kewajiban akan tanggung jawab sosial individu itu sendiri

No.	Item	Liberal	Komunitarian
1.	Sumber	Tradisi liberal ala Barat	Komunitarian ala masyarakat lokal
2.	Basis	Individualisme	Kolektivisme
3.	Semangat	Kebebasan individu	Kebersamaan secara kolektif
4.	Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum	Komunitas, <i>commune</i> , rapat desa, rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban, dll
5.	Metode	<i>Voting</i> secara kompetitif	Musyawarah
6.	Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberatif

Menurut penulis ada persamaan antara pandangan komunitarianisme dengan komunisme (otoritarianisme), yang menjadi titik persamaan adalah sama-sama memperjuangkan kebersamaan kolektif. Tetapi ada yang membedakan, kalau komunitarianis, menerima system kehidupan masyarakat yang demokratis untuk mencapai tujuannya. mengapa? karena menurut mereka demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan secara kolektif.

Dengan lebih mengedepankan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antarkelompok, yang bukan saja untuk keperluan self-help kelompok, tetapi juga sebagai wahana awareness warga, civic engagement dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan (governance) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta memungkinkan penggalan potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif kesimpulannya, mereka lebih melibatkan organisasi non pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. dua tipe system pemerintahan (governance). Pertama sistem pemerintahan demokratis (democratic governance). Kedua, sistem

pemerintahan otoritarian (authoritarian governance). dari dua system pemerintahan tersebut. dapat di kembangkan menjadi 4 model governance, seperti gambaran di bawah:

		Basis politik	
		Masyarakat	Negara
Basis ekonomi	Pasar	Libertarian	Korporatis
	Nonpasar	Komunitarian	Statis

Kriteria utama: basis politik (negara atau masyarakat) dan basis ekonomi (pasar atau nonpasar). Sistem politik yang berbasis masyarakat identik dengan system demokrasi, Dalam hal ini negara berbagi kekuasaan dan peran dengan masyarakat ketika mengelola pemerintahan, termasuk pembangunan dan kebijakan publik. Sedangkan sistem politik yang berbasis pada negara berarti sistem itu otoritarian (monocentris). Formasi negara tersusun secara hirarkhis-sentralistik, yang mengendalikan seluruh kehidupan masyarakat. Negara tidak berbagi kekuasaan dan peran dengan masyarakat. adanya suatu pembatasan hak dasar warga negara. kesimpulannya didalam system yang otoriter, peran negara sangatlah besar dibandingkan peran individu. sebagai timbal baliknya pemerintah akan mengurus semua kebutuhan baik secara social, ekonomi dan politik setiap warga negaranya.

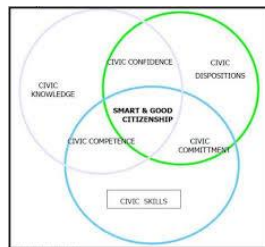
2.6 Kompetensi Dasar Keterampilan Kewarganegaraan

Sebagai warga negara tentunya harus dibekali dengan kompetensi atau kemampuan yang di refleksikan dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kompetensi sering diartikan sebagai suatu kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Dalam membentuk warga negara yang baik, diperlukan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang memadai. Berkenaan dengan hal tersebut Wuryan dan Syaifullah, (2009, hlm. 130) mengemukakan ada enam kompetensi warga negara yaitu:

- (1) Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi,
- (2) Membina ketertiban,
- (3) Membuat keputusan,
- (4) Berkomunikasi,
- (5) Menjalin Kerjasama, serta
- (6) Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar

Melihat pemaparan diatas, maka setiap warga negara dituntut harus memiliki keenam kompetensi tersebut, karena kompetensi-kompetensi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi warga negara dalam menunjang pembangunan disegala bidang kehidupan, khususnya bagi peningkatan sumber daya manusia disuatu negara. Winataputra (2001, hlm. 147) menggambarkan kompetensi warga negara dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 2.1 kompetensi kewarganagaraan



Gambar diatas menunjukan bahwa keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan sangat menunjang bagi pembentukan warga negara yang baik. Menurut Winataputra (2001, hlm. 333-335) terdapat karakter kewarganegaraan yang mencakup nilai toleransi sebagai karakter kewarganegaraan:

1. Membangun Kerjasama dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian dan kepentingan Bersama;
2. dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan dengan cara cerdas dan bertanggung jawab;
3. Turut serta mengatasi konflik sosial antartara pribadi/antar kelompok dengan cara yang damai dan dapat diterima;
4. Selalu membangun perasaan saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, ras, agama, dan golongan guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan;
5. Berusaha membangun saling pengertian antartara bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yang tersedia;

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan kewarganegaraan merupakan suatu bentuk keterampilan atau kemampuan yang

secara mutlak dikuasai oleh setiap warga negara secara utuh dan menyeluruh baik dilingkungan keluarga dan sekolah, serta dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menciptakan warga negara yang baik (*to be a good citizenship*).

2.6.1 Pengertian *civic skill*

Keterampilan Kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan Kewarganegaraan yang telah dikuasai warganegara. Dalam membentuk suatu warganegara yang baik (*good citizenship*), tentu diperlukan adanya aspek keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang harus dikembangkan oleh setiap warganegara. Warganegara yang baik (*good citizenship*) adalah warganegara yang memiliki kepedulian terhadap warganegara yang lain, berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan dan memberikan ide-ide kritis, dan berkemampuan membuat/menentukan pilihan atas dasar-dasar yang baik. Branson (1999, hlm. 17-20) menjelaskan bahwa Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) adalah kecakapan kewarganegaraan yang terdiri atas kecakapan Intelektual (kecakapan berfikir kritis) dan kecakapan Partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*. Hal ini dipertegas oleh Sapriya (2002, hlm. 72) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi: 1) Keterampilan Investigasi, 2) Keterampilan Berkomunikasi, 3) Berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterampilan Kewarganegaraan dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karna dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *civic skills* mencakup *intellectual skill* (keterampilan intelektual) *participation skills* (keterampilan Pasrtisipasi).

Dari beberapa pengertian tentang keterampilan kewarganegaraan diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah kecakapan kewarganegaraan yang terdiri atas kecakapan intelektual (kecakapan berfikir Kritis) dan kecakapan partisipasi yang bertanggung jawab, efektif dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*, keterampilan investigasi, dan keterampilan berkomunikasi. Semua Komponen tersebut sangat penting dimiliki warganegara.

Kecapakan intelektual atau kecakapan berfikir kritis tentang Isue politik tertentu, misalnya seseorang harus paham dulu tentang isue itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkauan alat intelektual atau pertimbangan bermanfaat tertentu yang berkaitan dengan isue itu. Kemudian dalam kemampuan berpartisipasi juga diperlukan dalam organisasi kemahasiswaan untuk memberikan suatu kebijakan dan menentukan suatu keputusan melalui Kerjasama dengan orang lain.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) memiliki beberapa indikator, seperti yang dikemukakan oleh White (2005, hlm. 10) sebagai berikut:

- a. Berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan Bersama (*interacting with other personal for common interest*)
- b. Melakukan aksi untuk menambah system politik (*taking action to improve political*)
- c. Pemantauan acara-acara public dan masalah-masalah masyarakat (*monitoring public events & public issues*)
- d. Menerapkan putusan kebijakan tentang masalah-masalah dalam masyarakat (*implementing policy decision on public issues*)
- e. Merunding dan membuat keputusan tentang masalah-masalah masyarakat (*deliberating & making decision on about public policy issues*)
- f. Mengaruhi para pembuat putusan kebijakan tentang masalah-masalah masyarakat (*influencing policy decision on public issues*)

Berdasarkan pendapat White tersebut, bahwa warga negara yang memiliki *civic skills* harus memiliki ke enam indikator tersebut. *Pertama* masyarakat harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi, manusia memiliki fitrah sebagai manusia sosial tentunya akan saling berinteraksi satu sama lain. Termaksud masyarakat yang wajib memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain agar memudahkan dalam menjalankan roda masyarakat serta menjadi bekal berharga dalam kehidupan berbangsa. *Kedua*, melakukan aksi untuk menambah system politik, yaitu memiliki makna sebagai sekumpulan manusia yang berintelektual yang memandang segala sesuatu dengan fikiran jernih, positif, kritis, yang bertanggung jawab, dan dewasa. secara moral.

1.6.2 Keadaban Kewarganegaraan (*civic virtue*)

Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 220), budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas

warganegaranya. Istilah budaya kemasyarakatan atau civic culture diciptakan oleh Gabriel Almond & Sidney Verba, (1963, hlm 8) dalam buku nya *The Civic Culture* untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Dengan menggunakan teknik-teknik penelitian survei pada saat itu, Almond dan Verba melakukan pengkajian di lima negara, yakni: Inggris, Jerman, Italia, Meksiko, dan Amerika Serikat. Namun, dalam proses pengkajian mereka maka terjadi perubahan studi politik komparatif yang menjauh dari kecenderungan eksklusif dengan analisis mendasar terhadap studi perilaku komparatif.

Prayogi dan Danial (2016) enurut Winataputra, (2012: 57), civic culture merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Dalam hal ini, civic culture sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. selain dari pada itu, Winataputra (2006, hlm. 58) menyatakan bahwa identitas warganegara yang bersumber dari civic culture perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Selain dari pada itu, Winataputra (2006, hlm. 62) Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan (civic culture) adalah “civic virtue atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.”

Konsep civic culture atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan democratic civil society atau masyarakat madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sipil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula segera harus mempunyai

komitmen untuk memperlakukan semua individu secara sama (Winataputra & Budimansyah. 2012: 233).

1.7 Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*)

Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 202) mengemukakan bahwa *civic culture... a set of ideas that can be embodied affectively in cultural representation for the purpose of shaping civic identities* atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk membentuk identitas warganegara. Dalam penelitian ini penulis mengartikan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam suatu komunitas atau kelompok yang secara sosial diakui serta dianggap penting oleh Sekolah, Masyarakat, dan Negara dengan indikator keadaban, tanggung jawab, kepedulian, keterbukaan serta cinta kepada tanah air. Budimansyah dan Suryadi (2008, hlm.186) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *civic culture* adalah sikap dan tindakan yang terlembagakan yang dibangun atas dasar Nilai-nilai yang menekankan pentingnya hak partisipasi warganegara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan public. Partisipasi ini dibangun atas hal-hal yang mendasar, diantaranya:

- a. *egalitarianisme* atau hubungan timbal balik secara Horizontal sesama warga
- b. *pluralisme*, dimana perbedaan paham, kepercayaan, dan kepentingan sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai, karena Toleransi sosial politik memberi ciri khusus; terhadap *civic community*.
- c. Rasa saling percaya (*trust*) dan solidaritas sesama warga.

Budaya warganegara (*civic culture*) merupakan perilaku masyarakat demokratis yang menyadari pentingnya partisipasi sebagai penggerak demokrasi dalam masyarakat, kemudian warganegara melakukan segera konsekuensi perilaku tersebut Ralph Nader dalam Alrakhman (2008, hlm. 48). Perilaku ini merupakan pengakuan atas potensi manusia yang memiliki rasa, karsa, dan karya secara sadar dan saling menghormati di antara pribadi masyarakat dan antar masyarakat. Dalam konteks ini budaya masyarakat yang diharapkan ada dalam pribadi individu adalah masyarakat yang tidak hanya berdiri dan berbicara saja, maupun masyarakat yang

hanya diam terpaku, melainkan masyarakat yang secara sadar siap terlibat dalam keberadaannya masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memiliki ciri khas bentuk yang disebut sebagai bangsa yang pluralistic. Aspek sosial-etnisitas kulturnya dalam bangsa ini telah mewujudkan integritas bangsa yang beragamdan bermacam-macam, diantaranya terdiri dari budaya-budaya etnisitas nasional. Dengan demikian hal itu akan dapat berubah menjadi budaya yang dapat merekatkan perbedaan sebagai salah satu alternative untuk membangun aspek Pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan persatuan kebangsaan Negara Indonesia.

Aspek sosial-kultural yang beraneka ragam itu perlu didasari dan diwarnai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila, agar dapat diupayakan menjadi Budaya Nasional. Konsep inilah yang lebih dikenal sebagai budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Substansi Budayakewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila itulah, yang dalam penelitian ini disebut budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Budaya kewarganegaraan atau *civic culture* dapat ditegaskan sebagai totalitas atau keseluruhan pola dan perwujudan perilaku masyarakat demokratis yang tercermin dalam partisipasi masyarakat sebagai pelaku demokratis dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan perilaku demokratis. Ralph Nader dalam Alrakhman (2008, hlm. 49). *From the magazine "Edges" published by the Canadian institute of cultural affairs*. Perilaku ini merupakan perwujudan dari potensi manusia yang memiliki rasa, karsa dan Karya secara sadar dan saling menghormati di antara pribadi masyarakat satu sama lain didalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini budaya masyarakat yang diharapkan secara sadar siap terlibat aktif dan sesuai dengan kedudukan dan peranannya di masyarakat dengan berlandaskan ideologi kebangsaan

2.7.1 ciri-ciri budaya Kewarganegaraan

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda namun, setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakekat sendiri yang berlaku

umum bagi semua kebudayaan dimanapun berada hal itu senada dengan Soekanto dalam Basrowi (2005, hlm. 76) mengatakan:

- a. kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
- d. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, Tindakan-tindakan yang dilarang dan Tindakan-tindakan yang diizinkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik disekolah dilingkungan lainnya, kita tentu suka memperhatikan berbagai perilaku masyarakat sebagai budaya warga negara. Ada warga masyarakat yang menunjukkan sifat dan perilaku yang baik, ada pula yang menunjukkan sifat dan perilaku yang buruk. Dengan demikian PKn tidak hanya merupakan program Pendidikan semata, tetapi merupakan Gerakan pembudayaan *'civic culture' local, national and global communities and their concerns* Cogan dalam Danial (2009, hlm. 4) kemudian didalamnya pun berisikan statement bahwa warga negara yang secara konseptual, seorang warga negara yang seyogyanya memiliki 5 ciri utama, yaitu: 1) Jati diri, 2) Kebebasan untuk menikmati hak tertentu, 3) memenuhi kewajiban-kewajiban terkait tingkat minat dan, 4) keterlibatan dalam urusan public, 5) tingkat dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kesemuanya disampaikan melalui bermacam institusi, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, termasuk media, tetapi hal tersebut biasanya dilihat sebagai bagian dan tanggung jawab sekolah.

Pendidikan kewarganegaraan, dalam pengertian yang luas, adalah tugas yang penting dan dalam semua masyarakat dimasa kini. Secara umum Effendi dan Sapriya (2004, hlm. 76) mengatakan sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab ditandai oleh beberapa ciri, yakni:

- a. menyadari akan kedudukan sebagai warga negara.
- b. memahami aturan hukum yang berlaku terhadap dirinya di setiap lingkungan kehidupan.
- c. memahami dan menyadari kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara.

- d. Melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.
- e. Menghindari sikap dan perilaku yang menimbulkan konflik antar sesama.
- f. Menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan sesama warganegara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara

Sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab menimbulkan akibat positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab dapat menumbulkan kerugian bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa manfaat dari sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diantaranya Effendi dan Sapriya (2004, hlm. 76) :

- b. menciptakan keamanan dan kedamaian hidup.
- c. memperlancar proses pembangunan Nasional.
- d. memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan ketertiban hidup dalam bermasyarakat.
- e. menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat.

Sebaliknya, sifat dan perilaku warga negara yang buruk dan tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan beberapa situasi yang sangat merugikan kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diantaranya:

- a. menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan konflik dan kerusuhan.
- b. Terciptanya kehidupan yang tidak teratur (anarkis).
- c. Terhambatnya pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.
- d. Rusaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Sulit tercapainya kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia saat ini, sifat dan perilaku warga negaranya masih sangat bervariasi. Ada warga negara yang sudah memiliki sifat dan perilaku baik. Adapula warga negara yang masih memiliki sifat dan perilaku buruk. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat juga demikian, ada warga masyarakat yang taat pada aturan hidup bermasyarakat, adapula warga negara masyarakat yang suka melanggar aturan hidup bermasyarakat. Akibatnya, suasana kehidupan bermasyarakat tidak tenang, resah, dan kadang-kadang anarkis. Berbagai kejahatan seperti penganiayaan, pelanggaran Hak azazi manusia, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja suasana ini tidak diinginkan oleh Sebagian besar warga masyarakat.

1.8 Definisi Pancasila

Pancasila merupakan sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana dasar negara Indonesia ini termanifestasi menjadi sebuah ideologi negara yang dapat menjadikannya sebagai asas atau dasar dari segala Tindakan dan perilaku bangsa Indonesia. Jika mengutip apa yang dikatakan oleh Pfor. Dr. Notonegoro (1983, hlm. 1) Bahwa “pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar falsafat atau dasar kerohanian negara kita”. Hal tersebut tentu tidak menjadikan pancasila hanya sebagai istilah belaka, akan tetapi menjadikannya sebagai pedoman dan acuan bagi segala perilaku dan Tindakan baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun pemerintahan di Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; artinya adalah semua aturan kehidupan hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada pancasila Al Muchtar (2016, hlm. 117).

Kedudukan dan fungsi pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian-pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminology yang harus dideskriptifkan secara objektif.

2.8.1 Kedudukan dan fungsi Pancasila

Begitu hebatnya pancasila sebagai dasar negara, hal tersebut dipandang sebagai kekuatan negara Indonesia untuk dapat menyejahterakan bangsanya melalui pancasila. Adapun pancasila memiliki fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa, pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.
- 2) Pancasila sebagai sistem filsafat pancasila bersifat obyektif ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham yang lain.

- 3) Pancasila sebagai sumber nilai, Nilai dasar Pancasila adalah Nilai Ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan.
- 4) Pancasila sebagai system etika, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud etika pancasila adalah etika yang mengacu dan bersumber pada nilai-nilai, norma pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 5) Pancasila sebagai paradigma keilmuan ekonomi, politik, hukum, dan Pendidikan.
- 6) Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sri Untari dalam Asmaroini, (2007, hlm. 60)

Kemudian, menurut Al Muchtar (2006, hlm. 123) terdapat fungsi pancasila yang populer dan nampak aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa seperti berikut:

- 1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
- 2) Pancasila sebagai dasar negara landasan filsafat untuk membangun negara
- 3) Pancasila sebagai ideologi untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara
- 4) Pancasila sebagai dasar negara republic Indonesia
- 5) Pancasila merupakan suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-undang Dasar 1945
- 6) UUD wujud Konstitusional hukum tatanegara untuk membangun organisasi negara mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat luhur
- 7) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggaraan yang merupakan semangat dan arah dalam penyelenggara yang berdasarkan Pancasila.

Dari fungsi tersebut, pancasila semakin kuat dengan adanya dorongan dari para pendiri bangsa dengan memberikannya kedudukan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
2. Meliput suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari undang-undang dasar 1945
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
4. Mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara

Dalam suatu penghayatan material pancasila yaitu sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa,

pedoman hidup bangsa, filsafat hidup bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai dasar NKRI dan Sumber Hukumn NKRI. Dan berfungsi sebagai dasar negara yang pada hakikatnya sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Proses pembentukan kepribadian pancasila diawali dengan adanya pemahaman dan aktualisasi pancasila sampai pada tingkat mentalitas, peribadian an ketahanan ideologis adalah sebagai berikut:

- 1 Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap, dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran pancasila. Kemudian diserapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri, memahami, serta memiliki pengetahuan pancasila.
- 2 Kemudian ditingkatkan kedalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan pancasila
- 3 Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan.
- 4 Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitasm yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan mentalitas.

Berdasarkan tingkatan dan proses pembentukan kepribadian tersebut, maka memiliki pengetahuan tentang pancasila menjadi suatu hal yang sangat vital. Oleh karena itu ditenggelamkannya pancasila dalam reformasi yang berlangsung hampir 15 tahun berakibat hilangnya estafet pewarisan nilai-nilai pancasila pada generasi penerus bangsa. Akibatnya generasi penerus dewasa ini dalam keadaan kekosongan identitas dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dimilikinya sendiri sebagai suatu kepribadian bangsa. Oleh karena itu dewasa ini proses pembentukan kepribadian berdasarkan nilai-nilai pancasila harus dilakukan secara serius, terutama oleh kalangan elit negara.

1.8.2 Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara membuat bangsa Indonesia memiliki pondasi dan pendirian yang kokoh untuk terus berkembang sesuai dengan

perkembangan jaman dan tidak terpengaruh atau goyah dengan gangguan dari pihak luar yang berusaha untuk mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Nilai pancasilamemiliki kebermaknaan yang teramat besar demi kemajuan bangsa dimana adanya satu kesatuan system nilai yang saling mengikat. Menurut Notonegoro dalam Kaelan, (2016, hlm. 65) bahwa:

Nilai-nilai pancasila termasuk nilai Kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai pancasila yang tergolong nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat tematik-hierarkihis, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosial sebagai tujuannya.

Kemudian diungkapkan oleh winarno (2012, hlm. 3) bahwa “kelima sila dari pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasaan dari silasila pancasila tersebut 1) Ketuhanan, 2) Kemanusiaan, 3) Persatuan, 4) Kerakyatan, dan 5) keadilan.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif, menurut Kaelan, (2006, hlm. 14) yang dimaksud adalah:

- 1) Rumusan dari ide-ide pancasia itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukan adanya sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai
- 2) Inti dari pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan;
- 3) Pancasila uamh terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai produk kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Idonesia.

Sedangkan Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan, karena:

1. Nilai-nilai Pancasia timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai peyebab adanya nilai-nilai tersebut,
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsanya diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran,

kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

3. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etika estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati Nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan di antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis namun tidak dapat dilepaskan keterkaitannya, hal ini dapat dilihat pada susunan Pancasila yang secara sistematis dan hirarkis yaitu bahwa nilai-nilai sila dalam Pancasila tersebut saling mendasari dimulai dari “ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa yang baik adalah Tindakan yang menimbulkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia.

2.9 Bhinneka Tunggal Ika

Wujud dari keragaman di dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” itu bermacam-macam yaitu terdiri dari suku bangsa, selain itu terdiri dari bermacam-macam budaya diantaranya religi/keagamaan, kesenian daerah yang terdiri dari Pertunjukan Rakyat, Lagu Daerah, Tarian Daerah, Alat Musik Daerah, Rumah Adat, Pakaian Adat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia yaitu agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk (Campbell et al., 2010).

Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme. Identitas bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang atau seperti yang telah dirumuskan

Bung Karno merupakan ekspresi dari roh kesatuan Indonesia, kemauan untuk bersatu dan mewujudkan sesuatu dan bermuatan yang nyata.

Perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut jelaslah merupakan hasil proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan in-formal. Menurut Masykuri Abdillah, salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan.

Kemajemukan ini merupakan Sunnatullah (hukum alam). Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para Founding Fathers kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Baidhowi, 2016). Tentunya setiap bangsa ingin menonjolkan keunggulan dari identitas bangsanya terlebih-lebih dalam era globalisasi dewasa ini di mana pertemuannya antar bangsa menjadi sangat cepat dan mudah.

Dalam pergaulan antar bangsa nilai-nilai yang positif dari suatu bangsa akan ikut membina perdamaian dan kehidupan yang lebih tenteram di planet bumi ini. Identitas bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sebagai bangsa yang ramah-tamah, toleran, kaya akan tradisi dari suku-suku bangsa yang Bhinneka perlu terus dikembangkan untuk kebudayaan dan perdamaian seluruh umat manusia.

Dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an itu berarti masyarakat Indonesia adalah plural, dan di dalam masyarakat plural, dialog adalah keniscayaan bahkan keharusan. Sesungguhnya bicara pluralisme dan dialog antar-agama itu bukan hal baru di negeri ini. Memang isu pluralisme adalah setua usia manusia, hanya cara dan metode manusia menghadapinya yang berbeda. Jadi masyarakat yang majemuk itu haruslah mengadakan dialog agar integrasi tetap terjaga dan mereka juga harus bersatu dalam perbedaan.

Prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) merupakan salah satu identitas pembentuk bangsa. Yang dimaksudkan dengan bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut

negara, atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi tetapi tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat-istiadat, ras, atau agama.

Setiap warga masyarakat akan memiliki kesetiaan ganda (multi loyalties) sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan terhadap identitas kelompok, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berwujud dalam bentuk bangsa-negara di bawah suatu pemerintahan yang berkeabsahan. Membina identitas bangsa memerlukan upaya yang berkesinambungan serta berkaitan dengan berbagai aspek.

Kedudukan seseorang sebagai warga negara Indonesia tidak mengenal diskriminasi, kehidupan bersama yang penuh toleransi dan menghindari berbagai perasaan curiga satu dengan yang lain atau tidak adanya trust di dalam kehidupan bersama, kemampuan dan keinginan untuk melihat perbedaan antar suku bukan sebagai hal yang memisahkan di dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari bahkan lebih mempererat dan mempercaya kehidupan dan kebudayaan nasional.

2.9.1 Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menurut Winarno, (2013:11) adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya”. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip-prinsip tersebut menurut Baidillah (2010:13) adalah sebagai berikut:

- a. Faham Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujanto disebut sebagai faham Tantarisme, bukan faham sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.
- b. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

- c. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun.
- d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain (Farisi, 2014). Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Agustrio, 2011). Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

2.9.2 Implementasi Bhinneka Tunggal Ika

Setelah kita pahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- a. Perilaku inklusif.

Yohana Nelawati Nababan, 2021

NILAI-NILAI TOLERANSI MASYARAKAT KEPULAUAN DALAM MEMAKNAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelkan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

b. Mengakomodasi sifat pluralistic

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarnya negara-bangsa Indonesia.

c. Tidak mencari menangnya sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Bukan pendapat sendiri

yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi *common denominator*, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai *win-win solution*.

e. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar maka negara Indonesia pun akan tetap kokoh dan bersatu selamanya